

PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MATARAM DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI

Nur Fadillah¹, Dini Andriani², Adriana Wahyuningsih³, Muhammad Aprian
Jaelani⁴

¹²³⁴Universitas Muhammadiyah Mataram³

dkyunfa12@gmail.com, andrianidini066@gmail.com,

adrianawahyuningsih@gmail.com, aprianjaelani@ummat.ac.id

Received: 01-06- 2024

Revised: 08-06-2024

Approved: 15-06-2024

ABSTRAK

Setiap instansi pemerintah melakukan revisi rencana kerja berdasarkan Peraturan PANRB Nomor 7 Tahun 2022 dengan tujuan mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Namun peraturan penamaan tersebut sebagian dikeluarkan setelah Pemerintah Kota Mataram menyusun Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 pada tahun 2016, sehingga struktur organisasi Sarana Daerah kurang sesuai dengan pedoman di atas dan membuat proses pengelolaan menjadi lebih efisien. Penelitian ini dilakukan di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Mataram di kota tersebut, berdasarkan penelitian yang dibahas dan dikembangkan dari laporan pemerintah dan jurnal ilmiah. Data dideskripsikan dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif untuk memperoleh gambaran pengembangan model untuk memecahkan permasalahan dalam manajemen program. Penilaian Departemen Keluargaterhadap struktur, operasional dan kinerja institusi Fasilitas Kabupaten Mataram yang diganti didasarkan pada peraturan penyederhanaan perkantoran. Hasilnya, peraturan ditetapkan dan infrastruktur kawasan Kota Mataram ditingkatkan kurang dari 50%. Tipologi besaran perangkat daerah akan menyederhanakan birokrasi. Hal ini membantu menentukan fungsi dan ukuran pemerintahan yang tepat.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Organisasi, Penataan Organisasi, Perangkat Daerah, Kota Mataram.

ABSTRACT

Each government agency revises its work plan based on PANRB Regulation Number 7 of 2022 with the aim of achieving good governance. However, the naming regulation was partly issued after the Mataram City Government drafted Regional Regulation Number 15 of 2022 in 2016, so that the organizational structure of the Regional Facilities is less in accordance with the above guidelines and makes the management process more efficient. This research was conducted at the Mataram Regency Regional Secretariat office in the city, based on research discussed and developed from government reports and scientific journals. Data were described and analyzed using qualitative analysis to obtain an overview of model development to solve problems in program management. The Department of Family Affairs' assessment of the structure, operations and institutional performance of the replaced Mataram Regency Facility was based on the office simplification regulation. As a result, regulations were established and the infrastructure of Mataram City area was improved by less than 50%. The typology of the size of the regional apparatus will simplify the bureaucracy. This helps determine the appropriate function and size of government.

Keywords: Bureaucratic Reform, Organization, Organizational Arrangement, Regional Apparatus, Mataram City.

PENDAHULUAN

Pemerintahan Indonesia mengalami perubahan besar pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto pada tahun 1998 (Sofyan, 2022). Gerakan reformasi lahir sebagai peralihan dari sentralisasi ke pemerintahan desentralisasi. Perubahan

ini juga merujuk pada aspek filosofi, teori, regulasi dan prinsip tata kelola yang telah dicapai bersama. Namun salah satu perubahan yang paling signifikan adalah kemampuan daerah untuk mengelola anggarannya sendiri secara penuh dan bertanggung jawab, yang dikenal dengan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah mengacu pada hak, kekuasaan, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut ketentuan hukum seperti UU No. 1 Tahun 1957, UU No. 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, dan terakhir UU No. 23 Tahun 2014. (Gredenggo et al., 2023)

Reformasi birokrasi pada hakikatnya upaya untuk melakukan reformasi atau perubahan mendasar terhadap sistem administrasi nasional dalam rangka mempercepat tujuan. Reformasi birokrasi, yaitu upaya untuk lebih mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Program reformasi birokrasi sedang berjalan, yang intinya terdiri dari reformasi organisasi, reformasi personnel, dan reformasi teknologi informasi untuk mendukung manajemen dalam proses perizinan. (Ninla Elmawati Falabiba, 2019)

Reformasi kelembagaan yaitu dengan membentuk lembaga baru yang menangani proses perizinan terpadu yang dimasa lalu proses perizinan harus melalui instansi yang berbeda dan dengan adanya reformasi birokrasi proses perizinan disatukan dalam satu badan yang bersifat terpadu, meningkatkan sumber daya manusia melalui diklat dan meningkatkan keterbukaan informasi melalui manajemen dengan dukungan teknologi informasi. (Ninla Elmawati Falabiba, 2019)

Dengan adanya reformasi ini, yang sebelumnya masyarakat sangat sulit mengakses informasi mengenai kinerja birokrat pemerintah, namun mulai saat ini masyarakat akan dapat mengetahui sejauh mana kinerja birokrat pemerintah, bahkan masyarakat lokal pun dapat mengetahui, disamping masyarakat diletakkan pada kedudukan yang sesungguhnya, yaitu sebagai pemilik pemerintahan. (Velásquez, 2018) Salah satu pilar utama dalam reformasi birokrasi adalah penataan OPD yang efektif dan efisien. Penataan OPD yang tepat akan menghasilkan struktur organisasi yang ramping, jelas, dan akuntabel, serta mendukung terciptanya birokrasi yang profesional, berkinerja tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Tatanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota didasarkan pada Tatanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang mempunyai misi menjamin terwujudnya Pemerintahan Daerah. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, penguatan dan percepatan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah melalui fokus Sesuai dengan prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan identitas daerah dalam sistem nasional kesatuan Efisiensi dan efektivitas Negara Republik. ('Anam, 2020) Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus ditingkatkan dengan membenahi aspek pemerintahan pusat dan hubungan antar daerah dan intra daerah, potensi dan keragaman daerah. Selain peluang dan tantangan kompetisi global, terdapat juga peningkatan fokus pada pemerintahan negara bagian dalam sistem administrasi terpadu. ('Anam, 2020)

Pada pelaksanaan reformasi birokrasi, Kota Mataram berhasil menjadikan kota yang melayani warganya melalui birokrasi yang profesional dan modern. Misi Kota Mataram meliputi mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas dan berkarakter, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur perkotaan, meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing, meningkatkan keamanan wilayah, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan partisipasi public. (Pertanggungjawaban et al., 2013)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses structural organisasi keinsinyuran daerah Kota Mataram berjalan dan factor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya struktur organisasi keinsinyuran daerah dan struktur organisasi reformasi keinsinyuran daerah Kota Mataram. Melaksanakan reformasi birokrasi

yang bertujuan untuk mengubah tata kerja pemerintahan, memperbaiki dan meningkatkan budaya dan mentalitas kerja pegawai negeri sipil, serta menjadikan penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih transparansi dan efisien. (Di et al., 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di kantor organisasi sekretariat daerah kota mataram dengan pertimbangan kantor tersebut sebagai leading sector pelayanan publik, peneliti ini menggunakan metode kualitatif dimana metode kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Basri (2014) menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena (Mohamed, Abdul Majid & Ahmad, 2010). Selain itu penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi, survei, wawancara, langsung terhadap pejabat pemerintah daerah. Data sekunder diperoleh dari laporan pemerintah, jurnal akademis, dan database online.

Dalam mengumpulkan data digunakan beberapa metode antara lain: 1) observasi, peneliti mengadakan observasi di kantor organisasi sekretariat daerah kota mataram yang menjadi objek penelitian ini dengan berbaur bersama pimpinan dan staf; 2) wawancara, dilakukan baik secara terbuka, terstruktur dan secara personal dengan beberapa informan kunci; 3) dokumentasi: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Laporan pemerintah, jurnal akademis, dan basis data online ditinjau untuk mengumpulkan informasi tentang penataan organisasi perangkat daerah kota mataram dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan struktur organisasi.

Analisis data yang dilakukan mengikuti prosedur-prosedur dalam penelitian kualitatif. Proses analisa data dilakukan dengan cara melakukan reduksi data yang diawali dari proses pengumpulan data, seleksi data, mengurut data kemudian mengorganisasikan ke dalam suatu pola/kategori yang sesuai dengan fokus penelitian. Teknik analisis data ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang kenyataan yang diamati/diteliti kemudian melalui proses analisis yang dituangkan secara naratif, dalam bentuk jurnal penataan organisasi perangkat daerah kota mataram dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan struktur organisasi. Analisis data penelitian bersifat bersama-sama dengan proses pengumpulan data. Setelah melakukan pengumpulan, reduksi, organisasi dan analisis data, kemudian dilakukan penafsiran sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas masalah penelitian. Komponen pengolahan data tersebut diatas berlangsung secara interaktif, saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain. (Abdul, 2020)

KAJIAN TEORI

Reformasi Birokrasi

Dalam birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Ini melibatkan perubahan dalam struktur organisasi, proses kerja, dan Reformasi birokrasi adalah proses perubahan sistematis dan berkelanjutan budaya kerja untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan utama reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat pembuatan kebijakan, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dengan demikian, reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat demokrasi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Reformasi birokrasi memerlukan komitmen dan partisipasi dari semua tingkatan pemerintah, serta dukungan dari masyarakat dan sektor swasta. Ini adalah proses yang berkelanjutan yang memerlukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (BAPENDA, jawa barat, 2024)

Organisasi

Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan “Organisasi mampu melaksanakan inovasi jika ditunjang oleh budaya organisasinya artinya organisasi inovatif cenderung mempunyai budaya yang serupa yaitu budaya yang mendorong eksperimentasi” (Robbins, 1996:337) dalam Suaedi, (2002). Adapun jenis struktur organisasi. Pada struktur organisasi mempunyai kelebihan dan kekurangan dan hanya berfungsi untuk perusahaan ataupun organisasi di dalam situasi tertentu atau pada suatu titik tertentu dalam siklus hidup. Menurut Gill Corkindale dari Harvard University menjelaskan desain dan juga struktur organisasi yang buruk menghasilkan kontradiksi yang membingungkan: kebingungan dalam suatu peran, dan kurangnya koordinasi antar fungsi, kegagalan untuk berbagi inovasi, dan pengutipan keputusan yang lambat membuat menjadi konflik yang kompleks.

Penataan Organisasi

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini tentu saja berdampak pada Peraturan Pemerintah No. 8 sejak tahun 2003, serta dari segi jumlah, struktur organisasi, dan kelompok mata pelajaran yang memerlukan penyesuaian dan penataan ulang. Selain itu, pada pertengahan tahun 2007 terjadi babak baru dalam struktur kelembagaan daerah Indonesia secara umum dan khusus. Hal ini disebabkan oleh peraturan pemerintah no. 41(PP 41/2007) tahun 2007 yang menggantikan peraturan sebelumnya tentang organisasi pembangunan daerah (PP 8/2003) memberikan beberapa poin perubahan yang harus segera direspon daerah jika tidak ingin ada kesulitan dengan negara dalam penyelenggaraan pemerintahandari anggaran. (Putera & Santoso, 2016)

Struktur Organisasi Perangkat daerah sendiri, menurut PP 41 Tahun 2007, organisasi daerah sendiri didasarkan pada variable jumlah penduduk, luas wilayah dan total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tentu saja salah satu produk dari kebijakan tersebut adalah restrukturisasi organisasi mesin daerah dan pembentukan organisasi daerah yang dapat melindungi dan melayani masyarakat local. Efisiensi dalam hal ini erat kaitannya dengan model struktur organisasi yang digunakan dalam pelaksanaan peraturan organisasi kelembagaan daerah.(Hertati, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kota Mataram

Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat terbentuk pada 31 Agustus 1993 dengan didasari oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Mataram. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2007 tentang peraturan perundang-undangan dan Administrasi umum provinsi, luas wilayah Kota Mataram adalah 6.130 (enam ribu seratus tiga puluh) hektar atau 0,30% dari luas wilayah provinsi. Provinsi Nusa Tenggara Barat dari segi kecamatan, Kecamatan Selaparang merupakan kecamatan terluas di Kota Mataram dengan luas wilayah 1.077 Ha atau 17,57%, sedangkan Kecamatan Ampenan merupakan kecamatan terkecil di Kota Mataram dengan luas wilayah 946,00 Ha atau 15,43%.

Tabel 1
 Jumlah Wilayah, kecamatan, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut pembagian Kota Mataram

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Lingkungan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)
Cakranegara	10	73	9,67	15,77
Sandubaya	7	45	10,32	16,84
Mataram	9	55	10,76	17,55
Selaparang	9	61	10,77	17,57
Ampenan	10	55	9,46	15,43
Sekarbela	5	36	10,32	16,84
Jumlah	50	325	61,30	100

Sumber: BPS Kota Mataram, 2021

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kota Mataram dalam Penyederhanaan Birokrasi

Dalam rangka memenuhi penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan struktur berdasarkan permen PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang system kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi yang bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) terlebih lagi dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur organisasi maka dari itu pemerintah daerah Kota Mataram melakukan evaluasi terhadap susunan perangkat daerah, dan besaran organisasi. Gambaran terhadap susunan organisasi pemerintah Kota Mataram tersebut dituangkan dalam peraturan daerah berkaitan dengan pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah Kota Mataram pada Peraturan daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016.(Menteri PAN & RB, 2022)

Dari susunan organisasi dan tata kerja sebelumnya, beberapa dinilai sudah selaras dengan pemerintah dan pembangunan secara nasional, terlebih untuk mawadahi tujuan Kota Mataram untuk meperintahan yang lebih maju sesuai visi-misi oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih. namun sebagaimana berpedoman pada Pasal 211 UU 23 Tahun 2014, Pasal 109 PP 18 Tahun 2016 menyebutkan, instruksi yang dikeluarkan kementerian atau badan penyelenggara harus diperhatikan dalam menyusun nomenklatur perangkat daerah dan satuan kerja kerja perangkat daerah. Sementara pedoman nomenklatur tersebut sebagian diterbitkan setelah pemerintah kota mataram menerbitkan peraturan daerah nomor 15 tahun 2016. Oleh karrena itu, beberapa struktur organisasi nomenklatur dan perangkat daerah terkesan tidak sesuai dengan peraturan di atas sehingga dilakukan penyesuaian. Sehingga proses organisasi menjadi lebih efektif dan efisien. (Zulaikha, 2016)

Penilaian terhadap struktur organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mataram, pada dasarnya besar kecilnya struktur organisasi sesuai dengan tipologi yang dihasilkan dari pemetaan urusan Pemerintahan. Namun terdapat beberapa judul yang harus disesuaikan dengan Peraturan menteri atau badan penyelenggaraan di luar kementerian terkait dengan pedoman nomenklatur kewenangan daerah. Tugas pokok kewenangan daerah dan tugas yang disesuaikan berdasarkan penyederhanaan birokrasi juga di evaluasi. Oleh karena itu, peraturan pembangunan dan pembangunan infrastruktur daerah di kota mataram yang ada saat ini mengalami perbaikan kurang dari 50% (lima puluh persen), oleh karena itu Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan standar hukum, apabila perbaikan kurang dari 50% maka dibentuk peraturan daerah perubahan, bukan peraturan daerah baru. Perubahan peraturan daerah ini meliputi perubahan pada dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, Lembaga persatuan bangsa dan politik, rumah sakit daerah, dinas pariwisata, dinas sosial, dinas Kesehatan, dinas perindustrian, nomenklatur dan tipologi, koperasi usaha kecil dan menengah, pelayanan Kependudukan dan Pencatatan kependudukan, pekerjaan konstruksi dan pelayanan perencanaan wilayah serta pelayanan pertanian.

Untuk melaksanakan pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi, maka pimpinan daerah harus mempertimbangkan dan berpedoman pada prinsip-prinsip pembentukan struktur organisasi perangkat daerah yang terdiri dari intensitas, efisiensi dan potensi daerah dalam urusan pemerintahan, pembagian kerja, ruang lingkup pengendalian, tata kerja yang baik, dan fleksibilitas, urusan administratif yang menjadi kewenangan Daerah.

Sasaran dari Evaluasi dan Penataan Kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Nomenklatur akibat penyederhanaan birokrasi maupun penambahan pada Perangkat Daerah sesuai dengan Pedoman Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan pemerintahan yaitu Dinas Pemadam Kebakaran menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
2. Peningkatan Tipologi Perangkat Daerah.
3. Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
4. Penambahan perangkat daerah yaitu organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
5. Konsep penyederhanaan birokrasi.

TABEL 2

Hasil Evaluasi Kelembagaan yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram
 Dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

No	Urusan	Perangkat Daerah	Tipologi		Keterangan
			Perda 15 Tahun 2016	2023	
1.	Pendidikan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	A	A	
2.	Pariwisata	Dinas Pariwisata	C	A	Nilai 1012
3.	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	B	B	
4.	Kesehatan	Dinas Kesehatan	B	A	Nilai 858
5.	Sosial	Dinas Sosial	B	A	Nilai 800,8
6.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A	A	
7.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	B	B	
8.	Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	B	A	Nilai 825

9.	Perdamaian, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Satual Polisi Pamong Praja	B	B	
10.	Sub urusan kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	C	C	
11.	Komunikasi dan informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	A	A	
12.	Statistik dan Persandian				
12.	Perumahan dan kawasan permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	B	B	
13.	Pertanahan				
13.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	C	B	Nilai 602
14.	Perhubungan	Dinas Perhubungan	B	B	
15.	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	A	A	
16.	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	B	B	
17.	Pertanian	Dinas Pertanian	C	B	Nilai 721
18.	Perikanan	Dinas Perikanan	C	C	
19.	Penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B	B	
20.	Koperasi, industri kecil dan menengah	Dinas Perindustrian, Koperasi, usaha kecil dan menengah	B	A	Nilai 792
	Perindustrian				Nilai 363
21.	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	C	C	
22.	Perdagangan	Dinas Perdagangan	B	B	
23.	Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	A	A	
24.	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	B	B	
25.	Keuangan	Badan Keuangan Daerah	A	A	
26.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	B	B	
27.	Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan	B	B	
28.	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B	B	
29.	Urusan Penunjang Pemerintahan	Sekretariat Daerah	B	B	

30.	Sekretariat DPRD	B	B
31.	Inspektorat	B	B
32. Kecamatan	Kec. Mataram	A	A
33.	Kec. Cakranegara	A	A
34.	Kec. Selaparang	A	A
35.	Kec. Ampenan	A	A
36.	Kec. Sandubaya	A	A
37.	Kec. Sekarbela	B	B
38.	RSUD	B	B
39.	BPBD	B	B

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mataram

Hasil pemetaan perangkat daerah sesuai peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 beberapa Dinas yakni Dinas Pariwisata, pelayanan Kesehatan, pelayanan Sosial. (*PEMERINTAH KOTA MATARAM Atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH*, 2022) Departemen Kependudukan dan registrasi kependudukan dan kementerian Perindustrian. Koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan dihasilkan lebih dan 800 sehingga tipelop dinas berubah menjadi tipe A serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hasil evaluasi kelembagaan lebih dari 600 sehingga tipologi dinas berubah dan tipe C ke tipe B.

SIMPULAN

Pemerintahan Kota Mataram merupakan ibu kota provinsi Nusa Tenggara. Kota ini berdiri pada tanggal 31 Agustus 1993 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993. Luas wilayah Kota Mataram adalah 6.130 hektar atau 0,30% dari luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara. Kecamatan Selaparang merupakan kabupaten terluas dengan luas wilayah 1.077 hektar, sedangkan Kecamatan Ampenan luasnya kecil 946 hektar. DPRD Mataram melakukan penilaian struktur fasilitas di zona berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016. Ini adalah evaluasinya. Itu dibuat untuk menyederhanakan kantor dan menyesuaikannya dengan peraturan baru. Berbagai perubahan dilakukan pada nomenklatur fasilitas daerah dan tipologi pelayanan yang tersedia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan manajemen. Hasil evaluasi menunjukkan banyak perangkat daerah yang mengalami perubahan nama dan tipologi. Pemadam Kebakaran kemudian berkembang menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Ada juga instrumen regional tambahan seperti persatuan nasional dan institusi politik. Seluruh perubahan tersebut akan dilakukan sesuai dengan instruksi kementerian/lembaga terkait. Dalam pembuatan instrumen daerah, berbagai prinsip seperti bobot kegiatan pemerintah dan kapasitas daerah, efisiensi dan efektivitas, pembagian tugas, pengendalian, prosedur yang jelas dan fleksibilitas diperhitungkan. Pengawasan dan pelembagaan bertujuan agar fasilitas daerah konsisten dengan prinsip dan praktik pengelolaan daerah. Hasil evaluasi dan pengorganisasian terhadap lembaga disajikan dalam tabel perubahan nomenklatur dan tipologi materi daerah. Banyak departemen seperti Departemen Pariwisata, Departemen Kesehatan, Dinas Sosial, Direktorat Kependudukan dan Perindustrian, koperasi dan dinas kecil dan menengah kini dihadapkan pada surat menyurat tipe A, dan dinas perencanaan diubah menjadi B. Semua perubahan tersebut dilakukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Nomor 18. Melalui tinjauan dan kerangka kelembagaan ini, kami berharap dapat menciptakan instrumen regional yang lebih baik dan berfungsi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Anam, K. (2020). PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DITINJAU DARI TEORI HENRY MINTZBERG (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember). *Pemerintahan Dan Struktur*, 2, 1–37.
- Abdul, A. (2020). Teknik Analisis Data Analisis Data. *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 1–15.
- Apparatur, k. e. (2022, APRIL 17). *PEMERPAN RB NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI*. Retrieved from PEMERPAN RB NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI: <https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/berita/permenpan-rb-nomor-7-tahun-2022-tentang-sistem-kerja-pada-instansi-pemerintah-untuk-penyederhanaan-birokrasi>
- Gredenggo, R. Y., Nurdin, I., & Amalia, R. (2023). Implementasi Kebijakan Penataan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *Journal on Education*, 5(4), 14791–14803. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2549>
- Hertati, D. (2015). Pengembangan Model Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya. *Spirit Publik*, 10(2), 1–16.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065>
<http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.humpath.2017.05.005>
<https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z>
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>
- Menteri PAN & RB. (2022). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. *Kementerian PANRB*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/202233/permen-pan-rb-no-7-tahun-2022>
- Ninla Elmawati Falabiba. (2019). *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Mataram Tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram*. 1–35.
- PEMERINTAH KOTA MATARAM Atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH*. (2022).
- Pertanggungjawaban, L. K., Mataram, W., Depan, D. I., Paripurna, S., Perwakilan, D., Daerah, R., Mataram, K., & Mataram, K. (2013). *Walikota mataram*.
- Putera, D. P., & Santoso, R. S. (2016). Evaluasi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and ...*, 5. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/12493>
- Velásquez, D. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *New England Journal of Medicine*, 372(2), 2499–2508. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065>
<http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.humpath.2017.05.005>
<https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z>
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>
- Zulaikha, S. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Revista Brasileira de Ergonomia*, 9(2), 10. <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355>
<http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731>
<http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269>
<http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>